



BAHAN KAPOLRI

**TENTANG
GERAKAN DAKWAH INTELEKTUAL MASJID KAMPUS
DALAM RANGKA MENANGKAL RADIKALISME**

(Disampaikan pada Workshop Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia pada hari Sabtu tanggal 10 November di Gedung Kemenristekdikti Senayan Jakarta Selatan)

I. PENDAHULUAN

1. Mahasiswa merupakan salah satu komponen masyarakat yang tidak dapat dinafikan keberadaannya. Posisi mahasiswa dalam struktur kemasyarakatan adalah sebagai *civil society of academia* atau masyarakat sipil yang terpelajar. Posisi ini memiliki daya tawar tersendiri dalam paradigma masyarakat secara umum. Terlebih mahasiswa merupakan subjek utama dalam medan intelektual paling tinggi, yaitu kampus perguruan tinggi.
2. Akhir-akhir ini, muncul suatu fenomena sosial yang serius dan memerlukan perhatian kita semua, dimana berdasarkan penelitian beberapa lembaga pemerintah dan swasta terdapat kampus yang terpapar paham radikal dan masjid kampus sebagai sasaran pengembangan paham radikal. Selain itu terdapat fakta bahwa salah satu kampus universitas negeri menjadi tempat aman bagi kegiatan terorisme.
3. Kondisi ini bila tidak disikapi dengan tepat bukan hanya akan merugikan mahasiswa namun juga akan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa mempunyai peran penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Untuk itu penguatan fungsi masjid kampus melalui gerakan dakwah kampus menjadikan masjid kampus bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah namun sekaligus juga berfungsi sebagai majelis Ilmu, silaturahmi maupun membicarakan masalah umat agar mahasiswa mempunyai kekokohan ilmu dan akhlak.

II. RADIKALISME DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Akhir-akhir ini beberapa lembaga riset menyebutkan bahwa beberapa perguruan tinggi telah terpapar radikalisme, bahkan ada yang menyatakan bahwa radikalisme di lingkungan kampus berawal dari masjid kampus, dan radikalisme merupakan cikal

bakal terjadinya terorisme. Namun untuk lebih jelasnya, maka lebih dahulu kita mempelajari apa yang dimaksud dengan radikalisme.

1. **Radikalisme dalam perspektif kriminologi**

Adalah Paham / aliran yang '*radikal*' dalam politik.; Paham / aliran yang menginginkan perubahan/pembaharuan sosial dan politik dengan cara yang drastis, atau kalau perlu dengan kekerasan; Sikap ekstrim dalam aliran politik; Kegiatan yang bertujuan merubah sistem sosial politik secara drastis.

Beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal , yaitu:

- a. Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain);
- b. Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah);
- b. Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya); dan
- c. Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Kriteria radikal

- a. Kelompok yang mempunyai keyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku.
- b. Dalam kegiatannya sering menggunakan aksi-aksi kekerasan dan bahkan kasar, terhadap kelompok masyarakat lainnya yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka.
- c. Secara sosio kultural dan sosio religious, mereka mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas.

Tipologi Radikalisme di Indonesia

a. Radikal Gagasan

Kelompok ini gencar mengemukakan gagasan, ide dan pikiran yang radikal dan ekstrim baik terkait isu politik, ekonomi maupun keagamaan yang berbeda dengan pandangan kebanyakan. Kelompok ini tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan juga berbahaya karena gagasan-gagasannya yang radikal dan ekstrim, misalnya ingin merubah dasar Negara melalui tulisan/mimbar bebas yang mengancam pandangan anak muda dan kita semua tentang wawasan bernegara, contoh HTI.

b. Radikal Premanisme

Kelompok radikal dalam bentuk residifisme, gangsterisme, dan fandalisme, kelompok ini tidak puas dengan hasil kerja aparat, sehingga mengambil alih tugas-tugas mereka seperti: Sweeping Club malam, Kafe dll

c. Radikal Milisi

Kelompok radikal yang terlibat dalam konflik komunal seperti kelompok yang terlibat di Poso dan Ambon.

d. Radikal Separatis

Kelompok radikal yang mengusung misi–misi separatisme, dengan tujuan tertentu, kelompok ini ingin memisahkan diri dari NKRI contoh: RMS, DI/TII, GAM dan OPM

e. Radikal Teroris

Kelompok radikal yang mengusung gagasan ideologi keagamaan dan melakukan aksi teroris.

2. Faktor penyebab berkembangnya radikalisme dan terorisme

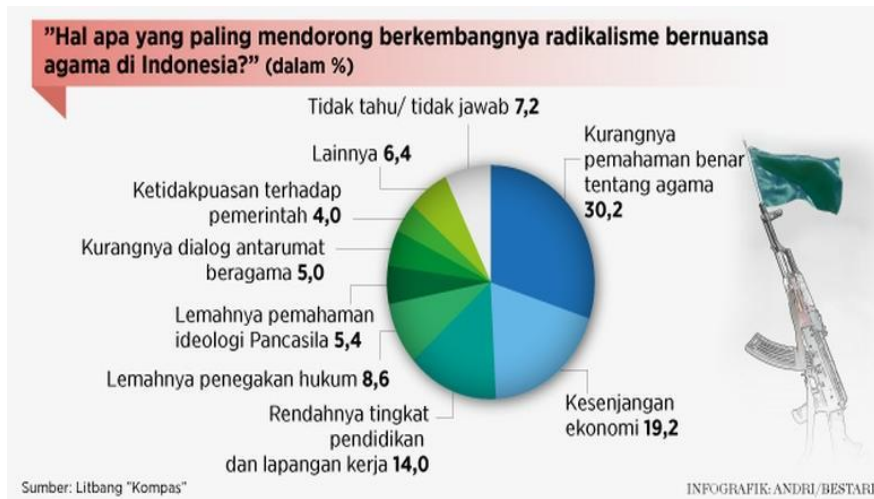
(KH As'ad Said Ali, Mustasyar PBNU/Majelis Wali Amanah (MWA) UPI Bandung/ mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara, 2018)

Dua faktor menonjol menjadi penyebab berkembangnya radikalisme di dunia:

- a. Banyak negara muslim yang belum berhasil merumuskan sistem politik dan pemerintahan di era modern, bahwa Al-Quran dan Hadits sendiri tidak secara eksplisit menentukan model sistem kenegaraan tertentu. Oleh karena itu, Para ulama menjadikan pengorganisasian masyarakat muslim Madinah sebagai contoh yang menjadi inspirasi pada sistem politik dan pemerintahan. Sehingga kaum radikal, menghendaki suatu negara teokratis dengan khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Sebaliknya kaum moderat merumuskan sistem politik dengan pertimbangan realitas kekinian yang disesuaikan dengan syariat Islam serta perkembangan budaya setempat. Perbedaan konsep kenegaraan inilah yang menjadi sumber konflik yang berujung pada kekerasan dan terorisme.
- b. Pasca perang dingin ada kecurigaan bahwa pihak Barat berusaha secara sistematis memaksakan sistem liberal/sekuler setelah merasa menang terhadap komunisme. Sistem liberal atau neo-liberalisme dianggap sebagai satu-satunya sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kaum neo-liberalisme menjadikan isu globalisasi sebagai pintu masuk penyebaran paham baik melalui campur tangan dalam penyusunan undang-undang negara muslim maupun penyebaran sekulerisme melalui media cetak, elektronik dan dunia maya untuk merubah kebudayaan kaum muslimin. Kaum muslim moderat tentu saja tidak menolak proses tersebut yang memang tidak bisa dihindari, tetapi dengan catatan adanya dialog yang sejajar atas dasar kepentingan bersama. Sebaliknya, kaum radikal menolak dan melawan melalui kekerasan yang bersifat global, yakni terorisme. Bahkan kaum radikal menjadikan kaum muslimin yang tidak sependapat dengan mereka sebagai target kekerasan.

3. Perkembangan Radikalisme di Indonesia

Hasil penelitian tentang “ Hal apa yang paling mendorong berkembangnya radikalisme bernuansa agama di Indonesia (dalam %), sebagai berikut:



4. Data Radikalisme di Perguruan Tinggi

- a. Direktur Jenderal Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Hamli mensinyalir semua kampus negeri di Jawa dan Sulawesi terpapar paham radikalisme berbasis agama. Data Mei 2018 BNPT membeberkan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal (2018).
- b. Temuan BNPT sejalan dengan survei Badan Intelijen Negara yang dirilis April 2018. Dari 20 perguruan tinggi yang disurvei di 15 provinsi selama 2017,
 - 1) Sebanyak 39 % mahasiswa antidemokrasi dan tak setuju Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
 - 2) Sekitar 23 % setuju bentuk negara Islam.

Data itu merupakan akumulasi masuknya paham radikalisme ke kampus sejak 30 tahun lalu. Selain UI, ITB, dan UIN Alauddin, kampus yang paling parah paparan radikalismenya adalah Institut Pertanian Bogor. Kampus negeri ini merupakan rumah lahir Hizbut Tahrir Indonesia pada 1982.

- 3) 2 Mei 2018, Dr Samidi Khalim Ketua Tim Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama Kota Semarang mengungkapkan hasil penelitian tentang "Pemahaman keagamaan dan transmisi ajaran agama di kalangan mahasiswa Islam dalam konstelasi kebangsaan " terhadap mahasiswa aktifis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada pada kegiatan seminar di Grand Wahid Hotel Jl. Jenderal Sudirman No 2 Sidorejo Kota Salatiga. Hasil Penelitian dari 688 responden sebagai berikut:
 - 1) 42 % mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Perguruan Tinggi Umum lebih memilih khilafah. 42 % responden menyatakan penerapan Khilafah sesuai dengan Indonesia,.
 - 2) 58 % menyatakan tidak setuju,.
 - 3) 93 % menyatakan Pancasila tepat menjadi dasar Negara Indonesia.
 - 4) 7 % tidak setuju dengan Pancasila

- 5) 51 % menyatakan setuju penerapan Undang-undang dengan hukum Islam.
- 6) 49 % menyatakan tidak setuju.
- 7) 77% menyatakan bahwa Demokrasi tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 8) 23 % menyatakan bahwa Demokrasi bertentangan dengan hukum Islam.

5. Pengaruh Islam Transnasional terhadap Radikalisme di Indonesia

Fenomena munculnya imigran dari Timur Tengah ke Eropa yang tidak mau beradaptasi dengan Islam yang ada di Eropa, bahwa Islam yang berkembang di Eropa bukanlah Islam yang benar menurut mereka. Gerakan kelompok Islam lintas Negara ini memiliki ambisi untuk menghidupkan kembali pengaruh Islam di seluruh dunia dengan konsep umat, bukan lagi konsep *nation state*. Kelompok ini didominasi oleh corak pemikiran skripturalis, fundamentalis atau radikal, namun secara parsial tetap mengadaptasi gagasan dan instrument modern.

Gagasan ini berkembang sampai ke Indonesia. Yang terindikasi dari adanya gugatan kelompok Islam fundamental atas adaptasi Islam di Indonesia terhadap budaya Indonesia sehingga tidak murni lagi, gugatan ditujukan langsung kepada Islam tradisional dan Islam moderat. Formula baru yang mereka tawarkan, baik politik maupun paham keagamaan diadopsi dari organisasi induknya yang berasal dari Timur Tengah

Pengaruh fundamentalisme agama Islam ditengah masyarakat muslim yang telah beradaptasi dengan budaya Indonesia membentuk dua alternative wajah Islam di Indonesia yaitu **pertama** gerakan yang menonjolkan kesalehan dan moderat, **kedua** gerakan politik Islam bersifat radikal dan Neo Fundamental. Gerakan pertama masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia sehingga lebih memilih jalan perdamaian daripada gerakan radikal , sedangkan pilihan kedua meskipun jumlahnya relative kecil namun karena gerakannya radikal maka dianggap oleh masyarakat dunia sebagai wajah muslim di Indonesia, dan pilihan kedua inilah yang melahirkan terorisme di Indonesia.

Beberapa organisasi Islam yang termasuk dalam kategori gerakan Islam transnasional dan mengembangkan pengaruhnya di Indonesia antara lain:

- a. Ikhwanul Muslimin (memberi pengaruh ideologi kepada Jamaah Islamiyah).
- b. Hizbut Tahrir (di Indonesia bernama Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan Pemerintah pada Juli 2017).
- c. Wahabiyah (di Indonesia tidak mengakui secara terbuka kelompok wahabiyah namun ajarannya dikenal dengan menjalankan Islam secara Kaffah dan mendukung Negara Khilafah).
- d. Jama'ah Islamiyah (selanjutnya berubah menjadi Jamaah Anhorut Tauhid/JAT, Jamaah Anshorut Daulah/JAD, dan Jamaah Anshorut S/JAS).

- e. Gerakan Salafi Jihadis (berpusat di Irak dan Afganistan).
- f. Syi'ah yang berpusat di Iran.

6. Pengaruh HTI di Lingkungan Perguruan Tinggi sebelum Putusan PTUN menguatkan Pembubaran HTI

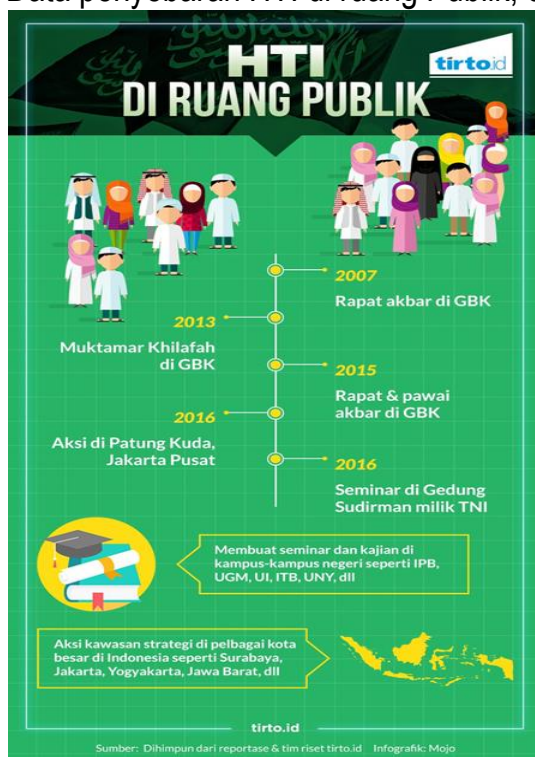
Ormas Hizbut tahrir Indonesia (HTI), yang memperjuangkan terbentuknya Negara Khilafah berdasarkan syariat Islam di Indonesia, terindikasi sebagai salah satu Ormas yang mengembangkan faham radikal. Termonitor sebelum dibubarkan HTI mengklaim telah mempunyai perwakilan di 32 provinsi, termasuk menyebarkan faham Khilafah di sekitar 106 kampus-kampus yang ada di 32 Provinsi.

Abdurahman Albagdadi (Warga Negara Australia pembawa ajaran Hisbut Tahrir ke Indonesia) datang pertama kali ke Ponpes Al Ghazali, di tempat tersebut yang bersangkutan mulai berinteraksi dengan para aktivis masjid kampus dari Mesjid Al-Ghifari, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Para aktivis kampus inilah yang mulai menyebarkan gagasan HT. Melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus, ajaran HT yang kemudian menjadi HTI menyebar ke kampus-kampus di luar Bogor seperti Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang, Universitas Airlangga (Unair) bahkan hingga keluar Jawa, seperti Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar.

Satu dekade kemudian, tepatnya pada dekade 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir mulai disampaikan kepada masyarakat umum dengan cara *door to door*. Tahap pertama, menurut Sa'ad Said Ali, penyampaian dakwah pada orang tua mahasiswa. Kedua, seiring dengan waktu lulusnya para mahasiswa, maka aktivitas dakwah mulai bergerak di perkantoran, pabrik, dan perumahan. Dakwah inipun dilakukan selama satu dekade, hingga dekade 2000-an. Setelah sukses menyebarkan faham Khilafah di kampus, HTI melauai membawa ajarannya ke ruang public

Data penyebaran HTI di ruang Publik, dan penolakan HTI di beberapa daerah



7. Data Pelaku Terorisme di Lingkungan Perguruan Tinggi

Penangkapan 3 alumni Universitas Riau terduga teroris di kawasan kampus Universitas Riau (Rio Bima Wijaya dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2002, Orandi Saputra dari jurusan Komunikasi angkatan 2004, dan Zam-zam Ilmu Pariwisata angkatan 2005). 2 terduga ditetapkan menjadi saksi sedangkan Zam-zam ditetapkan sebagai tersangka yang merencanakan akan diledakkan di kantor DPRD Riau dan DPR RI.

Aman Abdulrachman pelaku teror bom Sarinah Thamrin saat dalam persidangan menjelaskan bahwa pernah melakukan baiat anggota ISIS di gedung Syahida Inn dalam kampus pasca sarjana UIN Jakarta tahun 2013. Meskipun di dalam kampus, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh mahasiswa UIN.

Kedua kejadian tersebut menunjukkan kampus dapat menjadi tempat aman bagi teroris

III. PENGUATAN FUNGSI MASJID KAMPUS SEBAGAI GERAKAN DAKWAH INTELEKTUAL MAHASISWA

1. Fungsi Masjid di Jaman Rasullulah

Melihat dari sisi historisnya, sebuah masjid dibangun memang bertujuan untuk mempererat nuansa solidaritas keumatan. *Raison D'etre* nya sangat jelas, menumbuhkan soliditas keumatan dengan salat berjamaah, mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat baik dalam hal sosial, ekonomi, dan politik, dan yang paling penting berfungsi menjadi sekolah masyarakat dalam menata dan membentuk diri menjadi pribadi muslim yang taat, bukan menjadi "pemberontak". Hal inilah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw disaat pertama kali hijrah ke Madinah, membangun masjid yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan umat dan simbol perekat ikatan-ikatan solidaritas sosial.

2. Penguatan Fungsi Masjid Kampus

Selama ini memfungsikan masjid kampus sebagai tempat ibadah dan menimba agama Islam telah dilakukan oleh mahasiswa. Namun materi yang mereka terima demikian bebasnya tanpa filter, sehingga memberi peluang bagi pihak yang telah memiliki niat untuk menyebarkan faham radikal pada generasi muda (mahasiswa). Sebagai dampaknya masjid menjadi lembaga yang eksklusif dikuasai oleh satu kelompok atau sektarian bahkan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya tanpa memberi peluang kelompok lain untuk memanfaatkan masjid.

Untuk itu perlu program penguatan atau revitalisasi masjid kampus agar mempunyai peran dan fungsi sebagaimana masjid pada jaman Rasulullah Saw, bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi Masjid juga sebagai pusat dakwah, majelis Ilmu, silaturahmi maupun membicarakan masalah umat sehingga mahasiswa mempunyai kekokohan ilmu dan akhlak.

Program ini dapat dilakukan dengan mensinergikan mentoring bagi mahasiswa, pembentukan rumah bina karakter yang berbentuk asrama mahasiswa dan asrama masjid maupun tempat kos disekitar kampus serta pemanfaatan kegiatan keagamaan serta sinergi muatan pendidikan karakter dalam kurikulum perguruan tinggi.

Dengan kata lain kontribusi masjid kampus dilakukan dengan memposisikan diri sebagai wadah berhimpun seluruh sivitas akademika dari berbagai madzhab pemikiran keagamaan. Masjid tidak boleh dikuasai partisan, masjid kampus harus sebagai laboratorium sosial menampilkan mozaik Islam yang warna-warni, masjid kampus harus menjadi perekat sosial sekaligus lokomotif gerakan dakwah yang menyajikan wawasan Islam secara inklusif tidak sektarian yang mampu menghimpun seluruh potensi, kekuatan, sumberdaya, dan jaringan yang dimiliki umat untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

3. Gerakan Dakwah Intelektual Kampus dalam Menangkal Radikalisme

Telah kita pelajari bersama bahwa radikalisme agama di Indonesia sebagai faham yang dipengaruhi oleh gerakan Islam transnasional. Mereka mengembangkan suatu faham Islam fundamental yang sangat dipengaruhi darimana ajaran tersebut berasal dan menolak untuk beradaptasi dengan budaya Indonesia. Sudah tentu penyelesaian persoalan sosial di masyarakat akan mengacu kepada penyelesaian Timur Tengah yang bila dipaksakan akan menuai penolakan masyarakat muslim yang tetap menyelesaikan persoalan berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Masjid kampus sebagai wadah gerakan dakwah kampus diharapkan dapat seawal mungkin mengidentifikasi masuknya faham radikal di sekitar kampus, dan secara aktif menjadi pelopor perlawanan terhadap radikalisme di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu diharapkan peran sertanya dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu agar:

- a. Menolak dengan tegas ajakan untuk bergabung dengan kelompok radikal yang menolak sistem demokrasi dan Pancasila sebagai dasar NKRI.
- b. Berperan aktif dalam mencegah dan menangkal perkembangan faham radikal di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat.
- c. Menjalankan toleransi dalam berinteraksi sosial antar dan internal agama, suku, kelompok sosial dll untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan NKRI.
- d. Tidak menjadikan faham radikal sebagai ideologi dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara Indonesia.
- e. Senantiasa mendukung dan terlibat pada pelaksanaan program pemerintah dalam rangka pencegahan berkembangnya faham radikal dan terorisme di Indonesia.
- f. Menyampaikan gagasan perbaikan dan pemecahan permasalahan bangsa Indonesia melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-undang penyampain pendapat di muka umum.

IV. UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN RADIKALISME DAN TERORISME

1. PREEMTIF

- a. Melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap kelompok yang berafiliasi atau cenderung berfaham radikal.
- b. Meningkatkan deteksi dini, dengan cara membangun kemampuan Polsek sebagai basis deteksi, memperkuat peran dan fungsi Bhabinkamtibmas untuk membangun Pemolisian masyarakat dalam upaya menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.
- c. Bersama BNPT dan Instansi terkait melaksanakan program kontra radikal dalam rangka mencegah berkembangnya faham radikal di tengah masyarakat.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainnya guna terpeliharanya situasi Kamtibmas, terutama dalam rangka, khususnya mencegah berkembangnya faham radikal yang berpotensi merongrong keutuhan NKRI.
- e. Membangun kemitraan dan mendorong peran serta masyarakat dalam menangkal berkembangnya faham radikal di Indonesia.
- f. Berperan aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran dan mengungkapkan fakta di lapangan tentang bahaya radikalisme, intoleransi dan terorisme bagi kelangsungan dan keutuhan NKRI pada forum diskusi, seminar, silaturahmi dll

2. PREVENTIF

- a. Meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan yang dapat menjadi pintu masuk/jalur pelaku terorisme.
- b. Meningkatkan pengamanan lokasi-lokasi rawan/yang diperkirakan akan menjadi sasaran serangan kelompok teroris.
- c. Bersama Pemda dan Instansi terkait lainnya bersinergi dalam membangun sistem peringatan dini terhadap upaya pengembangan faham radikal, intoleransi dan terorisme di tengah masyarakat
- d. Meningkatkan kepekaan atas permintaan pertolongan masyarakat terhadap Polri (Quick response).
- e. Melakukan modernisasi Polri
- f. Melaksanakan manajemen media dalam rangka menangkal penyebaran faham radikal di tengah masyarakat melalui berbagai media komunikasi.

3. REPRESIF

Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan terukur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku pidana terutama yang berkaitan dengan aksi radikalisme, intoleransi dan terorisme.

V. REKOMENDASI

1. Polri bersama instansi terkait, mahasiswa/Gerakan dakwah intelektual kampus dan masyarakat kampus meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dalam penanggulangan dan pencegahan berkembangnya paham radikalisme dan terorisme di lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Polri bersama Instansi terkait, mahasiswa/Gerakan dakwah intelektual kampus dan masyarakat kampus sesuai tupoksi masing-masing mendorong terciptanya ketahanan untuk menangkal berkembangnya paham radikal dan terorisme di lingkungan perguruan tinggi.
3. Mahasiswa dan masyarakat kampus menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu harus berperan aktif dalam mencegah Kampus menjadi sasaran pengembangan paham radikal dan terorisme yang akan merongrong kesatuan, persatuan dan kelangsungan NKRI, yang telah susah payah dibangun oleh para pendiri bangsa.
4. Berani menyatakan tidak dan stop kampus menjadi tempat pengembangan paham radikal dan terorisme di Indonesia.

Jakarta, 10 November 2018

1.